

MODEL WISATA HALAL BERBASIS KOMUNITAS

Atang Abd. Hakim¹⁾, Uu Nurul Huda²⁾, dan Rohmanur Aziz³⁾

¹⁾Mu'amalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, atangabd.hakim@uinsgd.ac.id

²⁾Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, uunurulhuda@gmail.com

³⁾Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, ronaz@uinsgd.ac.id

Abstrak

Wisata Halal di Indonesia sedang menjadi *brandmark* untuk jenis wisata yang menarik untuk dikembangkan. Wisata halal merupakan sebuah upaya fleksibilitas hukum Islam dalam konteks praktis gaya hidup kekinian yang mengintegrasikan nilai *halal* dan *thoyyib* (baik) pada bidang wisata guna meningkatkan perekonomian masyarakat. Desa Wisata Halal merupakan sebuah desa wisata yang menawarkan nuansa religiusitas yang tercakup di dalam aspek mu'amalah pada kehidupan kepariwisataan yang berlandaskan prinsip-prinsip syari'ah. Cibuntu telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan sebagai Desa Wisata memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi desa wisata halal. Kegiatan pendampingan ini menggunakan metode PAR (*Participatory Action Research*) ini memiliki tiga variabel kunci yaitu, *Participatory* (keterlibatan), *Action* (aksi pengabdian) dan *Research* (penelitian). Hasil dari kegiatan ini di antaranya: pertama, terbangun kesadaran politik pemerintah desa, stakeholder Kompepar (Kelompok Penggerak Pariwisata) dan masyarakat Desa Cibuntu dalam membangun dan mengembangkan potensi wisata sejarah, wisata alam, dan agrowisata menjadi destinasi wisata halal. Kesadaran tersebut telah dimulai dengan penyusunan draft rancangan Peraturan Desa tentang pengembangan desa wisata halal Desa Cibuntu; kedua, terbina keberdayaan masyarakat dalam mengelola Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia Desa Cibuntu agar siap mewujudkan desa wisata halal; ketiga, munculnya perhatian pemerintah daerah pada pengembangan masyarakat Desa Cibuntu melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dengan membangun Pendopo Pemberdayaan Desa Cibuntu sebagai tempat diskusi dan konsultasi antara pihak-pihak terkait masyarakat Desa Cibuntu.

Kata Kunci: Wisata Halal, Prinsip Syari'ah, Desa Wisata Halal

Abstract

Halal Tourism in Indonesia, now is becoming a brand for attractive types of tourism to be developed. Halal tourism is an effort to flexibility Islamic law in the practical context of the current lifestyle that integrates the values of *halal* and *thoyyib* (good) to the tourism sector in order to improve the economy of the community. Halal Tourism Village is a tourist village that offers the nuances of religiosity that are included in your aspects of tourism in life based on shari'ah principles. Cibuntu as a village established by the Kuningan Regency Government as a Tourism Village has the potential to be developed into a halal tourism village. This mentoring activity uses the PAR method (Participatory Action Research) which has three key variables, namely, Participatory (involvement), Action (service action) and Research (research). The results of these activities include: *first*, the political awareness of the village government, stakeholders of Kompepar (the Driving Group of Tourism), the Cibuntu Village Community in building and developing the potential of historical tourism, natural tourism and agro tourism into halal tourism destinations. This awareness has begun with the drafting of the *Peraturan Desa* draft on the development of the halal village of Cibuntu village; *second*, community empowerment in managing the Natural Resources and Human Resources of the Cibuntu Village is ready to realize a halal tourism village; *third*, the emergence of local government attention to the development of the Cibuntu Village community by building the Cibuntu Village Empowerment Halal as a place of discussion and consultation between parties involved in the Cibuntu Village Community.

Keywords: Halal Tourism, Syari'ah Principle, Halal Tourism Village

PENDAHULUAN

Sejak tahun 2012, Cibuntu ditetapkan sebagai Desa Wisata yang terletak di wilayah utara Kabupaten Kuningan dekat dengan batas wilayah Kabupaten Cirebon. Penetapan Desa Wisata ini diinisiasi oleh Pemerintahan Desa Cibuntu yang bekerjasama dengan sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata Tri Sakti Jakarta melalui program Pengabdian kepada Masyarakat dan kemudian pada tahun 2018 dilakukan pendampingan oleh tim Pengabdian kepada Masyarakat

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung untuk menjadi Desa Wisata Halal. Pelaku utama pada pendampingan tersebut, yaitu masyarakat Desa Cibuntu yang terkumpul pada Kelompok Penggerak Pariwisata (Kompepar) Desa Cibuntu. Desa Cibuntu yang lokasinya berada tepat di kaki lereng utara Gunung Ciremai ini telah ditetapkan sebagai desa wisata pada tahun 2012 oleh pemerintah Kabupaten Kuningan. Sebagai salah satu desa wisata di Kabupaten Kuningan, Desa Cibuntu memiliki

berbagai macam potensi wisata. Potensi ini tidak terlepas dari letak Desa Cibuntu yang dekat dengan Gunung Ciremai. Objek dan daya tarik yang dimiliki desa wisata ini di antaranya wisata sejarah, wisata alam, dan agrowisata.

Adapun potensi-potensi wisata yang ada di Desa Cibuntu di antaranya Taman Nasional Gunung Ciremai, Hutan Konservasi Bambu Betung, Mata Air Kahuripan, Kampung Kambing, Curug Gongseng, Loa, Situs Bujal Dayeuh, Situs Saurip, dan Kesenian Tradisional, serta Minuman Khas Jasreh (Jahe sareng Sereh), Minuman Tehreh (Teh Sereh) dan kuliner lainnya.

Jumlah Homestay di Desa Cibuntu saat ini berjumlah 40 (empat puluh) homestay, bahkan pada tahun 2017, salah satu homestay di Desa Cibuntu, yakni Homestay Teratai 3 terpilih sebagai peringkat kelima terbaik homestay dalam ajang ASEAN Award 2017. Bahkan pada tahun yang sama, Desa Cibuntu dinyatakan masuk dalam peringkat dua Desa Wisata Terbaik Tingkat Nasional 2017 kategori *Community Based Tourism*, pada kegiatan Apresiasi Usaha Masyarakat Bidang Pariwisata pada acara *Wonderful Indonesia Tourism Awards 2017*, di Hotel Bidakara Jakarta. Perkembangan Desa Wisata Cibuntu tersebut tentunya tidak dapat dilepaskan dari peran serta pemerintahan daerah kabupaten Kuningan melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Pemerintahan Desa dan Kompepar Desa Cibuntu sebagai komunitas masyarakat yang menjadi ujung tombak penggeraknya.

Terwujudnya Desa Wisata Halal di Desa Cibuntu pun seiring dengan kebijakan pembangunan Kabupaten Kuningan yang terumuskan dalam visi Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018, yaitu Kuningan Mandiri, Agamis dan Sejahtera (MAS) Tahun 2018 pun menjadi daya dukung yang kuat untuk mewujudkan wisata halal di Desa Cibuntu. Tafsiran MAS ini terumuskan bahwa mandiri bermakna suatu keadaan dan kemampuan masyarakat dalam perekonomian rakyat fokus pada ketahanan pangan, pengelolaan dan pengembangan sumberdaya alam daerah serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Agamis bermakna bahwa nilai-nilai agama sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat yang kondusif, toleran, harmonis dan religius. Sejahtera bermakna adanya peningkatan kesejahteraan berupa pemerataan pembangunan di semua pelosok wilayah, kesempatan berusaha dan bekerja, perlindungan masyarakat miskin dan kesetaraan gender.

Pada perkembangannya, Cibuntu sebagai desa wisata mengalami berbagai masalah diantaranya masih ada persepsi dari sebagian wisatawan yang memandang bahwa tempat wisata terkait dengan kebebasan sehingga para sebagian pengunjung merasa bebas bergaul. Pasangan muda-mudi yang belum menikah seringkali tampak pacaran di tempat wisata Desa Cibuntu. Hal ini

mengundang keresahan dari beberapa tokoh masyarakat yang menjunjung adat istiadat dan tokoh agama yang menjunjung nilai-nilai keagamaan. Melalui pendampingan desa wisata halal, diharapkan ada perubahan sosial masyarakat Desa Cibuntu yang sadar untuk mengawal konsep Desa Wisata Halal yaitu desa wisata yang bebas dari perilaku menyimpang dengan sistem yang diformulasi pada Peraturan Desa (Perdes).

Penyusunan Perdes Desa Wisata Halal, dilakukan oleh masyarakat yang dimotori oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai hasil dari proses tahapan siklus pemberdayaan pada pendampingan Desa Wisata Halal Cibuntu.

Di Indonesia *Term* Wisata halal yang dikenal kali ini merupakan perubahan dari *term* wisata syariah yang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Dewan Syariah (DSN) No. 108/DSN-MUI/X/2016 disebut Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Perubahan ini terjadi karena ada “penolakan” dari salah satu daerah yaitu Provinsi Bali. Namun demikian, penolakan ini terlihat berdampak positif, karena term wisata halal akhirnya diterima dan nampak lebih familiar, dan bahkan *lafadz halal* merupakan *lafadz* yang disebut oleh Al-Qur`an yang memiliki nilai komersial tinggi .

Bila dirujuk ke awal kemunculannya pariwisata syariah mulai diperkenalkan sejak tahun 2000 dalam pertemuan OKI. Ia merupakan suatu pemenuhan wisata yang didasarkan pada gaya hidup) *life style* (bagi wisatawan muslim selama liburan. Disamping itu ,iapun merupakan pariwisata yang fleksibel, rasional, sederhana dan seimbang. Pariwisata ini bertujuan agar wisatawan termotivasi untuk mendapatkan kebahagiaan dan berkat dari Allah SWT (Munirah, & Ismail, 2012).

Terdapat beberapa istilah yang menggambarkan konsep wisata syariah ini. Malaysia menggunakan istilah *Islamic tourism*. Uni Emirat Arab disebut sebagai *family friendly tourism*. Sementara, Jepang lebih memilih istilah *halal tourism*. Sementara Indonesia, menggunakan *term* wisata Syariah ,yang kemudian berubah menjadi wisata halal.

Secara terminologi wisata berarti perjalanan. Dalam makna ini, ia memiliki variasi makna yang mendeskripsikan perjalanan dengan berbagai motif seperti *al-saer* (السير), *al-safar* (السير), *al-siyâhah* (الرحلة), *al-ziyârah* (الزيارة), dan *al-rihlah* (الرحلة). Bahasa Arab kontemporer lebih memilih istilah *al-siyâhah* untuk konsep wisata) *tourism* (Hasyim, 1424). Secara bahasa *al-siyâhah* berarti pergi kemana saja dengan motif apa saja. Al-Qur`an menyebut kata *al-siyâhah* dalam beberapa tempat (Q.S. al-Taubah:2 & 112).

Al-siyâhah adalah kata yang (yang ambigu) *musytarak*. Ia berarti jihad, shaum, atau perjalanan) *al-siyar*. Menurut istilah, (*al-siyâhah*) *tourism* (memiliki makna beragam. Bahkan terdapat, paling tidak ada 43 definisi tentang *tourism*).

Pengertian wisata (*tourism/ al-siyahah*) diadopsi dari pengertian yang disodorkan oleh Fatwa DSN MUI, yaitu kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Perjalanan ini membutuhkan sejumlah pelayanan untuk memenuhi kebutuhannya selama dalam perjalanan ini. Adapun pengertian wisata halal diambil dari pengertian wisata syariah yang ditawarkan oleh Fatwa DSN MUI, yaitu wisata yang sesuai dengan perinsip syariah. Artinya segala sesuatu yang terkait dengan kegiatan pariwisata tidak bertentangan dengan norma dan aturan Islam. Ia terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, berlebihan (*tabdzir/israf*) berlebihan dan kemunkaran. Sebaliknya, ia dapat menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan material dan spiritual .

Penyelenggaraan wisata halal didasarkan atas peraturan perundang-undangan, *nash*, dan fatwa DSN MUI. Dari sisi perundang-undangan ialah UU No 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata dan diikuti oleh Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kapariwisata, karena UU sebelumnya (UU No 9) dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan kepariwisataan sehingga perlu diganti dengan UU berikutnya. Secara tegas fatwa DSN MUI menjelaskan, bahwa penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa, yaitu fatwa No 108 Tahun 2016.

Adapun *nash* yang menjadi landasan hukum pariwisata halal seperti tertuang dalam Fatwa DSN MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah adalah; Q.S.67: 15, Q.S. 71: 19-20, Q.S.30: 9, Q.S.29: 20, Q.S. 62:10 dan hadits Nabi Riwayat Ahmad dari Abu Hurairah, Riwayat al-Baihaqi dari Ibnu Abbas, Riwayat Abu al-Razzaq dari Ma'mar dari Abu Thawas dari Bapakny, Riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin 'Umar. Inti dari hadits-hadits ini adalah perintah untuk melakukan perjalanan (wisata) agar menjadi sehat, *ghani* dan memperoleh rizqi. Disamping itu, ada kaidah fiqh yang menjelaskan bahwa setiap kegiatan muamalah itu hukumnya boleh, dan wisata merupakan bagian dari muamalah, selama tidak ada ketentuan yang melarangnya.

METODOLOGI PENGABDIAN

Strategi yang dipakai dalam pendampingan ini adalah dengan menggunakan metodologi PAR (*Participatory Action Research*) ini memiliki tiga Variabel kunci yaitu, *Partisipatoriy* (keterlibatan), *Action* (aksi) dan *Research* (penelitian). Sedangkan berdasarkan urutan metodologi kerja PAR ketiga Variabel terdiri dari pertama, *research* (penelitian), tahap ini merupakan tahapan penelitian tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, permasalahan tersebut dipahami sedemikian mendalam dan mendetail sehingga masalah tersebut bisa diketahui dengan jelas sebab dan akibatnya. Kedua, *action* (aksi), setelah mengetahui masalah-masalah tersebut secara mendalam dan mendetail, barulah masuk langkah yang kedua yaitu pencarian alternatif jalan keluar untuk memecahkan masalah tersebut, yang kemudian diterjemah kedalam beberapa item program kerja yang akan dilaksanakan. Ketiga, *participatory* (partisipasi), kedua item diatas dilaksanakan secara partisipatoris, artinya dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam melakukan identifikasi masalah serta teknik pemecahannya secara bersama-sama mengikuti alur siklus PAR. Adapun tahapan siklus yang dilakukan yaitu: Refleksi Sosial, Pemetaan, Perencanaan, Aksi Sosial dan Monitoring/Evaluasi. Pada setiap tahapan ditagihkan keluaran (output) untuk ditindaklanjuti bersama pada tahapan berikutnya.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Proses pendampingan Desa Wisata Halal Cibuntu dimulai dari tahapan pra siklus pemberdayaan, yaitu *transect/ observasi partisipatif* atau penelusuran wilayah. Ini dilakukan untuk mengetahui data awal mengenai masalah dan potensi Desa Cibuntu. Transect merupakan aktifitas penelusuran wilayah di Desa Cibuntu sebagai wilayah dampingan untuk didorong menjadi Desa Wisata Halal. Tim PkM melakukan aktifitas transect 27 sampai dengan 29 Oktober 2018. Selama 2 hari yaitu pada tanggal 27 dan 28 Oktober, tim PkM janjian dan bertemu dengan beberapa tokoh masyarakat Desa Cibuntu yaitu Bapak Ibnu Sungkawa selaku Sekretaris Desa atau akrab disebut Pak Ulis, Bapak Rahmat selaku ketua Komunitas Penggerak Pariwisata (Kompepar) Desa Cibuntu, Ibu Eem, Ibu Een dan Ibu Yeyen selaku tokoh wanita sekaligus pengelola Homestay, dan Bapak Tirta selaku ketua kelompok peternak domba pada Kampung Domba. Pada saat transect ditemukan bahwa Desa Cibuntu merupakan wilayah pedesaan yang berada di sebelah utara gunung Ciremai Kuningan memiliki berbagai potensi. Pertama, potensi sumber daya alam yang kaya baik vegetasi dengan berbagai jenis tanaman hasil tani seperti padi dan tanaman umbi-umbian, palawija, buah-buahan dan sebagainya, maupun tumbuhan yang hidup liar

disekitar hutan Ciremai seperti nangka, alpuket, durian, bambu dan berbagai pepohonan lainnya. Kedua, potensi budaya yaitu sistem interaksi masyarakat Desa Cibuntu yang menjunjung tinggi nilai budaya Sunda dengan keramahannya, sopan santun dan komunikasi yang baik pada siapapun. Ketiga, potensi Sumber Daya Manusia yaitu adanya daya dukung dari warga yang sukses diperantauan kemudian pulang ke kampung halaman di Cibuntu untuk membangun Desa Cibuntu pada masa pengabdian. Hal ini diperlihatkan oleh Kepala Desa dan keluarganya. Keempat, potensi asset, yaitu kepemilikan harta kekayaan masyarakat desa yang dioptimalkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat seperti tanah carik yang digunakan untuk kampung domba. Penyebutan kampung domba dimaksudkan pada suatu tempat “lokalisasi” peternakan domba milik warga yang diakui Bapak Tirta sebagai ketua kelompok peternak kampung domba sudah terjadi sejak dulu kala sejak ada desa Cibuntu. Tradisi ini kemudian ditegaskan dengan pencanangan “Kampung Domba” pada tahun 2007. Dengan demikian tidak ada warga desa yang memelihara domba disekitar rumah penduduk, walaupun penduduk desa ini berada dipinggir hutan bagian utara kaki gunung Ciremai.

Tradisi yang dilembagakan ini diakui warga sebagai bentuk kepedulian masyarakat untuk memelihara kesehatan lingkungan. Pola ternak yang bersatu dengan pemukiman penduduk dipandang akan menimbulkan masalah kesehatan dan pencemaran lingkungan. Lokasi kampung domba berada di tanah carik desa yang posisinya di sebelah timur desa Cibuntu. Secara geografis, di lokasi ini terdapat dua bukit di tengah sawah yang dimanfaatkan oleh pemerintahan desa dan masyarakat. Bukit sebelah utara dimanfaatkan Tempat pemakaman Umum (TPU) dan kebun rumput *manjah/* rumput gajah (rumput pakan ternak) dan bukit bagian selatan kampung domba.

Selanjutnya, tahapan siklus I pemberdayaan pada pendampingan Desa Wisata Halal Cibuntu yaitu Rembug Warga. Proses Rembug Warga dilakukan bersama perangkat desa dan perwakilan masyarakat aktifis kelompok penggerak pariwisata (Kompepar) terdiri dari KWT, pengelola homestay, pengelola kampung domba dan hadir pula tokoh pemerintahan, tokoh agama, serta tokoh masyarakat.

Rembug Warga merupakan proses awal dalam siklus PkM Sisdamas. Siklus ini dilaksanakan karena PkM Sisdamas merupakan upaya penanggulangan masalah-masalah sosial yang diintervensi oleh pihak luar (pemerintah), sehingga masyarakat harus diberi kesempatan untuk mengambil keputusan berkehendak untuk menerima atau menolak PkM Sisdamas sebagai alternatif pemecahan masalah. Oleh karena itu RW merupakan proses awal dari pengejawantahan

pembangunan partisipatif, karena masyarakatlah yang berhak untuk menentukan apakah mereka akan melakukan upaya penanggulangan masalah sosialnya sendiri.

Apabila masyarakat memutuskan untuk menerima PkM Sisdamas, maka secara otomatis masyarakat harus mempunyai komitmen untuk melaksanakan upaya penanggulangan masalah sosial dengan koridor yang sudah dikembangkan oleh PkM Sisdamas, yaitu melaksanakan proses pembelajaran dalam daur penanggulangan masalah sosial secara partisipatif yang diejawantahkan dalam tahapan siklus-siklus selanjutnya.

Komitmen yang disepakati oleh masyarakat berimplikasi kepada beberapa konsekuensi yang harus dijalankan oleh mereka seperti: mengikuti pertemuan-pertemuan untuk melaksanakan setiap proses tahapan siklus, adanya motor penggerak yang bekerja dengan sukarela, kesediaan untuk bekerjasama dari berbagai pihak (tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda aparat pemerintah setempat, dll), menyediakan dana swadaya untuk berbagai pertemuan dan pelatihan, dan sebagainya.

Dengan mengetahui segala konsekuensi yang harus dihadapi diharapkan masyarakat betul-betul siap untuk menerima intervensi PkM Sisdamas bukan karena ‘iming-iming’ bantuan dana akan tetapi karena benar-benar mempunyai kehendak untuk melakukan upaya penanggulangan masalah sosial secara bersama-sama.

Persiapan pemerintah desa adalah tahap yang sangat penting untuk kelancaran proses pelaksanaan kajian. Persiapan sebenarnya sudah diawali dengan proses sosialisasi. Dengan persiapan ini diharapkan bahwa masyarakat dapat memahami maksud dan tujuan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat (melalui PkM Sisdamas). Selain itu, persiapan dapat juga melahirkan suatu kepercayaan (*trust*), keterbukaan dan suasana akrab di antara masyarakat dan Tim Dosen PkM.

Salah satu tahap dalam sosialisasi adalah penyusunan rencana kegiatan sosialisasi konsep PkM Sisdamas. Dalam rencana tersebut menyangkut tentang kesepakatan mengenai tempat, waktu, dan kegiatan. Untuk tempat, biasanya masyarakat sendiri mengatur penyediaan tempat tersebut. Yang perlu diperhatikan meliputi luasnya tempat (cukup luas untuk semua peserta seperti gedung serbaguna desa atau masjid), tempat menyesuaikan dengan kondisi cuaca, dan tempat mudah dicapai untuk masyarakat serta peserta PkM.

Adapun waktu pelaksanaan sosialisasi awal dan rembug warga disepakati bersama masyarakat. Biasanya masyarakat tidak dapat mengikuti kegiatan sepanjang hari karena harus kerja kebun atau kerja lain.

Pelaksanaan PkM Sisdamas membutuhkan banyak waktu dan perlu kesabaran masyarakat dan fasilitator. Kajian Keadaan Pedesaan terdiri dari lebih dari pada satu

kegiatan dan perlu beberapa pertemuan dengan masyarakat. Waktu pelaksanaan disesuaikan dengan keadaan setempat dan keinginan masyarakat. Rencana pelaksanaan perlu diingatkan kepada masyarakat supaya masyarakat, termasuk yang tidak sempat hadir pada saat sosialisasi, akan mengikuti kegiatan pemberdayaan. Perlu diingatkan bahwa perempuan juga perlu terlibat dalam kegiatan kajian sebagaimana amanat Millenium Development Goal's (MDG's) yang berlanjut pada isu Sustainable Development Goal's (SDG's) yang mengharuskan partisipasi 30% kaum perempuan. Sering kali masalah-masalah yang diangkat kurang peka terhadap kebutuhan perempuan dan terlalu memperhatikan pria.

Adapun media sosialisasi dilakukan dengan cara formal dan non formal. Secara formal, pemerintahan desa memfasilitasi pembuatan, penggandaan dan penyebaran informasi kepada seluruh warga desa tentang agenda rembug warga desa. Secara informal, dapat diumumkan pada kegiatan-kegiatan masyarakat melalui pengeras suara di masjid atau balai desa, sisipan pengumuman pada saat kegiatan pengajian, *tahlilan*, kegiatan PKK dan lain-lain. Pemanfaatan media sosial digital pun sangat mungkin dilakukan seperti facebook, WA, instagram atau media sosial konvensional seperti majalah dinding.

Pelaksanaan kegiatan rembug warga dapat dikemas dalam berbagai variasi, baik dilaksanakan di dalam ruangan (*in door*) maupun di luar ruangan (*out door*). Acara dipandu oleh perangkat desa sebagai pemangku kepentingan utama, sambutan kepala desa dan tim PkM. Kemudian tim PkM menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan tim PkM untuk belajar bersama masyarakat dalam membangun desa. Kegiatan dilanjut dengan penawaran penyepakatan konsep PkM Sisdamas yang mensyaratkan pelaksanaan siklus oleh masyarakat bersama tim PkM. Bukti penyepakatan ini berupa Berita Acara, daftar hadir dan dokumentasi lainnya yang dipandang penting. Pada kegiatan ini juga berorientasi pada output dan outcome berupa kehadiran para relawan dari masyarakat yang siap menjadi duta pemberdayaan di tingkat basis masing-masing. Pada momentum sosialisasi dan rembug warga ini bisa secara paralel dilaksanakan siklus berikutnya yaitu refleksi sosial.

Pada Rembug Warga di Desa Wisata Cibuntu, Pertemuan dibuka oleh Sekretaris Desa Bapak Ibnu sebagai tokoh pemerintahan Desa Cibuntu dengan pengantar materi pentingnya pertemuan warga untuk menambah wawasan tentang konsep desa wisata halal. Selanjutnya Sekdes mempersilahkan Tim PkM untuk memandu kegiatan Rembug Warga.

Pada Rembug Warga ini ada tiga agenda penting yaitu sosialisasi, penyepakatan proses pendampingan dan refleksi sosial. Sosialisasi dan penyepakatan dipandu oleh

Ketua Tim PkM Dr. H. Atang Abd. Hakim mulai dari pemaparan konsep Desa Wisata Halal hingga tahapan-tahapan pendampingan. Setelah selesai pendampingan, Ketua Tim PkM bertanya kepada warga yang hadir: "apakah bapak/ibu menyepakati program yang kami tawarkan?" warga pun merespon dengan menyatakan sepakat, kemudian dilaksanakan penandatanganan berita acara penyepakatan pendampingan.

Setelah selesai sosialisasi dan penandatanganan berita acara penyepakatan, acara diskor untuk rehat santap malam dengan menu kuliner bubur khas Desa Wisata Cibuntu bernama "Jolem" yaitu kependekan dari kejo (nasi) dan celem (sayur) dicampur daun meninjau muda, dan tokol (toge besar) dan dage (oncom). Kuliner ini menjadi salahsatu kekhasan masyarakat Cibuntu yang potensial untuk diperkenalkan kepada para wisatawan terutama disajikan di homestay sebagai sarapan pagi yang baik untuk tubuh. Melinjo atau (sunda: tangkil) memberikan citarasa tersendiri untuk kuliner jolem.

Pada sesi berikutnya dilakukan tahap ketiga siklus pemberdayaan setelah istirahat, yaitu refleksi sosial. Tahapan ini merupakan proses dialogis antar masyarakat yang dipandu oleh fasilitator agar masyarakat mengetahui dan memahami masalah, kebutuhan, potensi, akar masalah dan harapan-harapan masyarakat. Refleksi ini dilakukan dengan teknik *Focus Group Discussion* (FGD), yaitu diskusi kelompok terarah mengenai penyikapan terhadap masalah yang sedang dihadapi masyarakat. Melalui FGD Refleksi Sosial ini, ditemukan bahwa masalah utama yang dihadapi masyarakat yaitu masalah ekonomi. Masyarakat Desa Wisata Cibuntu mayoritas sebagai buruh tani sehingga kesehariannya sibuk bekerja di ladang dan sawah. Dengan demikian, masyarakat tidak begitu peduli tentang masalah Desa Wisata yang dipandang hanya sebagai program para elit desa saja. Melalui refleksi sosial, masyarakat dapat memahami makna dan arah Desa Wisata yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun masyarakat Cibuntu juga berharap besar jika status Desa Cibuntu sebagai Desa Wisata tidak mengganggu adat istiadat dan norma agama yang dibawa oleh para wisatawan. Melalui refleksi sosial ini, tim PkM menawarkan konsep wisata halal, dan direspon positif oleh masyarakat dan disepakati untuk implementasi konsep Desa Wisata Halal.

Setelah selesai refleksi dan masyarakat menemukan akar masalah dan mengungkap harapan-harapannya pada perubahan status Desa Wisata Cibuntu, langkah berikutnya, dilakukan pemetaan sosial dan pengorganisasian masyarakat. Pemetaan sosial yaitu proses partisipatif masyarakat membuat dan menyusun peta masalah, kebutuhan dan potensi Desa Wisata Cibuntu sebagai visualisasi hasil refleksi yang dapat lebih mdah difahami oleh masyarakat Cibuntu.

Peta desa disepakati oleh peserta FGD, hasil refleksi berupa kebutuhan dan masalah selaraskan pada peta dengan symbol-simbol yang disepakati seperti masjid desa dengan simbol gambar bulan bintang, kampung domba dengan simbol gambar domba dan sebagainya.

Hasil visualisasi pada peta desa kemudian diturunkan pada tabel-tabel yang menginventarisir seluruh hasil pemetaan sosial. Adapun poin-poin yang didapat dari hasil pemetaan Desa Wisata Cibuntu menuju Desa Wisata Halal adalah sebagai berikut. Pertama, Cibuntu sudah memiliki *brand* atau merk sebagai desa wisata bagi masyarakat Kabupaten Kuningan dan sekitarnya. Kedua, Sejak ada Desa Cibuntu, tanah carik/ bengkok yang terletak disebelah timur desa dijadikan tempat peternakan Domba milik warga dan disebut Kampung Domba. Konsep lokalisasi Kampung Domba ini dikuatkan oleh peraturan desa pada tahun 2007. Dengan demikian tidak ada penduduk yang memelihara ternak Domba di perumahan penduduk, tetapi membangun kandang pada tanah carik desa di Kampung Domba. Ketiga, Memiliki model tani ternak organik, yaitu sebuah sistem yang terpadu antara pertanian dan peternakan dengan memanfaatkan kotoran hewan (kohe) dan urin domba sebagai pupuk organik. Sementara pakan ternak didapat dari vegetasi yang ada di Cibuntu seperti melimpahnya buah nangka muda (*gori*) dan jerami yang dapat dipermentasi dan bertahan hingga penyimpanan selama 2 minggu hingga 1 bulan. Keempat, masyarakat Cibuntu memiliki modal sosial sebagai desa wisata yaitu karakter masyarakat yang selaras dengan 7 pesona wisata (*sapta pesona*), yaitu: aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah dan kenangan. Kelima, Luasnya jaringan pergaulan masyarakat desa Cibuntu sehingga memicu datangnya tamu dari berbagai lapisan masyarakat tidak terkecuali kalangan pejabat dan tokoh nasional. Kelima, Telah memiliki 60 homestay dan satu diantaranya sudah menjadi model mendapat peringkat ke-5 terbaik tingkat ASEAN. Keenam, sebagian warga memiliki keahlian memproduksi kuliner khas Cibuntu, diantaranya minuman yang terbuat dari jahe dan serih (*jasreh*), olah ubi jalar yang diberi nama *ciled*, *jolem*, *kukis rebung*, *cistik ubi*, *kremes ubi*, *wajit ubi* dan sebagainya. Ketujuh, Sejak tahun 2017, Cibuntu sudah mendapatkan predikat *Open Defecation Free* (ODF) yaitu kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan. Saat ini, status lingkungan Cibuntu sedang menuju Sanitasi Total berbasis Masyarakat (STBM) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan. Kedelapan, Vegetasi di Cibuntu relative lengkap karena letak geografisnya berada di sebelah utara kaki gunung Ciremai. Diantara vegetasi yang potensial yaitu, pohon alpuket, nangka, kakao, durian, manga, pisang, kluwek, berenuk, maja, mahoni, berbagai jenis bambu (*bitung*, *tamiang*, *gombong*), padi, ubi jalar, bunga penuh (*bentuknya indah berwarna orange dan*

umbinya dapat dijadikan obat penyakit bisul), rumput gajah (*pakan ternak domba*) dan sebagainya. Kesembilan, secara sosio kultur keagamaan masyarakat Cibuntu termasuk masyarakat yang *religious* yang tidak mempertentangkan budaya sunda dan Islam, harmoni dalam agama dan budaya.

Tahapan kelima pada siklus pemberdayaan ini yaitu pengorganisasian masyarakat. Pada tahap ini tidak diperlukan ada proses pembentukan organisasi untuk menggerakkan keberdayaan masyarakat untuk orientasi desa wisata halal. Hal ini disebabkan oleh eksistensi Komunitas Penggerak Pariwisata (Kompepar) Desa Cibuntu yang sudah eksis menjadi motor penggerak desa wisata Cibuntu yang dipimpin oleh Bapak Rahmat seorang pensiunan PNS.

Pada tahap siklus kelima ini, Kompepar bertugas mengolah data hasil pemetaan untuk ditabulasi pada dokumen perencanaan partisipatif yang kemudian disingkronisasi dengan Rancangan Perencanaan Jangka Menengah Desa Cibuntu agar terjadi sinergi program. Pada tahap perencanaan, hasil pemetaan diolah kembali oleh Kompepar untuk dilakukan penetapan prioritas program dengan intervensi penyalarsan konsep wisata halal yang yang ditawarkan oleh tim PkM sebagai implementasi hasil riset pada tahun 2017. Pada proses ini dilakukan konsultasi bersama Kepala Desa Cibuntu Bapak Awam yang akrab dipanggil oleh masyarakat dengan sebutan Abah Kuwu. Sebagai kepala desa dan sebagai muslim, Abah Kuwu menyampaikan dukungan dan kesediaannya untuk implementasi konsep Desa Wisata Halal dengan beberapa catatan. Pertama, konsep halal tidak hanya sekedar tulisannya saja secara eksplisit, namun Cibuntu menuju Desa Wisata Halal agar sesungguh-sungguhnya terjamin kehalalannya baik dalam aspek produk, layanan, maupun aturan-aturan yang berlaku. Kedua, pertemuan antara konsep halal dari ajaran Islam dan budaya sunda di Cibuntu diharapkan tidak melahirkan pertentangan sehingga memunculkan konflik di masyarakat. Ketiga, Cibuntu membutuhkan bimbingan yang berkelanjutan untuk mewujudkan Desa Wisata Halal, bahkan bukan hanya halal tapi juga sehat dari pihak-pihak yang kompeten dan peduli.

Kepala Desa menuturkan bahwa dari aspek keagamaan (Islam), Cibuntu kekurangan Sumber Daya Manusia yang dapat membimbing masyarakat Cibuntu agar dapat faham dan mengerti serta dapat mengamalkan ajaran Islam. Cibuntu membutuhkan tokoh agama yang dapat mengayomi semua golongan dan dapat berdakwah dengan bijaksana sehingga pemahaman tentang konsep *halalalan thoyiban* dapat dengan mudah dicerna oleh masyarakat. Bagi Abah Kuwu, konsep halal bukan hanya masalah kuliner, namun juga tentang kepemilikan harta, tanah dan sebagainya. Abah Kuwu mencontohkan bahwa

ngambil kakau atau duren yang sudah jatuh di hutan saja, bagi dirinya sesuatu yang haram untuk dikonsumsi. Pemahaman seperti ini belum bisa diterima oleh masyarakat, karena bagi masyarakat hutan di kaki gunung Ciremai yang berbatasan dengan Desa Cibuntu dianggap tidak ada pemilikinya dan semua berhak untuk mengkonsumsi apapun hasil hutan tersebut.

Tampaknya pandangan Abah Kuwu tidak terlampaui berlebihan bila dilihat dari sudut pandang kearifan, bahwa pola interaksi antara sesama manusia dan antara manusia dan alam harus teratur, sistemik dan harmoni yang dalam istilah agama, *halalan thoyyiban*.

Oleh karena itu, melalui pertemuan warga pada kegiatan perencanaan partisipatif, seluruh stakeholder masyarakat desa Cibuntu sepakat bahwa status Desa Wisata Halal merupakan solusi untuk dilekatkan pada status Desa Wisata Cibuntu menjadi Desa Wisata Halal Cibuntu. Adapun agenda prioritas pelaksanaan program agar Cibuntu menuju status desa wisata halal, yaitu: Pertama, menyusun draft rancangan peraturan desa (raperdes) tentang Desa Wisata Halal terkait dengan layanan dan tata kelola yang berbasis syari'ah. Kedua, mengadakan pendampingan pengelolaan berbagai unit terkait dalam konsep desa wisata halal, dan ketiga pendampingan proses sertifikasi produk makanan dan layanan halal di Desa Cibuntu secara bertahap.

Pada tahapan siklus pelaksanaan program, sudah dapat dilaksanakan penyusunan draft peraturan desa oleh Badan Perwakilan Desa yang didampingi oleh tim PkM dan pendampingan sertifikasi produk minuman khas Cibuntu yaitu Jahe Sereh melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Cibuntu merupakan Kawasan administratif di Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan yang subur dan kaya dengan sumber daya alam. Cibuntu berasal dari kata *Ci* dan *buntu*. *Ci* atau *cai* artinya air dan *buntu* artinya kuldesak atau tidak ada lagi jalan terusan (Amangkurat; 2011). Secara kronologis, sejarah Cibuntu pada generasi pra dan pasca kemerdekaan dapat diurai sebagai berikut: Pada tahun 1921, Buyut Kamsin digantikan oleh putranya yang bernama Buyut M. Atmawijaya hingga tahun 1948 saat terjadi perang gerilya melawan penjajahan Belanda. Pada masa Pemerintahan Buyut M. Atmawijaya, tahun 1937 Gunung Ciremai meletus, warga Desa Cibuntu mengungsi ke luar diantaranya ke Desa Paniis. Untuk mengurangi beban warga Desa pengungsian, Pemerintah memberi izin tinggal di areal Tanah Negara (GG atau Pengangonan) kepada masyarakat pengungsi asal Cibuntu yaitu di lokasi yang kemudian diberi nama Sukamanah. Maka Pemerintah Desa beserta warganya untuk sementara

membangun tempat tinggal sederhana, Balai Desa, Masjid dan jalan.

Pada masa pengungsian, masyarakat hidup susah. Tiap pagi berjalan naik ke Cibuntu untuk bertani dan beternak, sore hari turun kembali ke Sukamanah yang berjarak 3 km. tiap pagi dan sore mereka mandi, cuci, kakus dan keperluan air untuk minum dan memasak yaitu dari Cibetul dan Sikalomberan (jarak keduanya rata-rata 1 km).

Disisi lain Pemerintah tidak hanya memberi ijin tinggal, lebih dari itu bahkan memberikan bukti pemilikan atas tanah yang mereka tempati dalam bentuk L.D pada tahun 1941.

Pada tahun 1942 masyarakat berangsur-angsur pindah kembali ke tempat asal (Cibuntu) sampai tahun 1945.

Keuntungan yang mereka peroleh adalah keselamatan dan L.D tanah. Mereka mulai menata kembali kampung halaman mereka sedikit demi sedikit.

Tahun 1948, Buyut M. Atmawijaya meninggal dunia dan putra nomor 2 bernama K. Danawijaya terpilih untuk menjadi Kepala Desa/Kuwu hingga tahun 1953. Tahun 1953, K. Danawijaya berhenti atas kehendak sendiri karena pekerjaan barunya di kota Bandung. Tahun 1953 – 1967 A. Sastrawijaya terpilih sebagai Kuwu Cibuntu. Kiranya cobaan belum selesai, pada tahun 1953 giliran Gerombolan DI/TII yang mengancam keselamatan warga. Cobaan yang tak kalah berat ini berjalan selama 9 tahun (sampai tahun 1962). Mulai saat itulah barangkali warga Desa Cibuntu mulai menggeliat dan berjalan tertatih-tatih untuk menata diri dan keluarganya serta sarana dan prasarana umum. Masih pada masa Pemerintahan Abah A. Sastrawijaya, tahun 1967 Bapak Sujai menemukan benda purbakala di kebun sebelah rumahnya (Peti batu dalam tanah berisi Kapak Genggam 11 buah) benda tersebut di bawa ke Kuningan. Pada tahun yang sama (Tahun 1967) ditemukan benda-benda Purbakala berupa Kapak Genggam terbuat dari batu berwarna Virus/Hijau berjumlah 4 buah yang kemudian diambil oleh Pemda Kabupaten Kuningan yang katanya disimpan di Musium Cipari berikut peti batunya 6 bidang berat 2 ton. Pada saat Pemerintahan Abah A. Sastrawijaya lah penulis mulai mendengar nama-nama situs yaitu: *Ceker Kidang*, *Buyut Kencring / Loa*, *Sidarangdan / Ruyuk Cucuk*, *Sorog Jaya*, *Sibubur / Hulu Dayeuh*, *Karapyak / Bujal Dayeuh*, *Jeruk Bonteng / Birit Dayeuh*, *Saurip Kaler – Saurip Kidul*, *Panyusupan*, dan lain-lain.

Akhir tahun 1967, Bpk. H. Edi Kurdi menjadi Kuwu yang ke 13. Berikutnya pada tahun 1972 bulan Februari diadakan penggalan besar-besaran oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan beserta Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional dari Jakarta. Perwakilan dari Pemda Kuningan : Jati Kusumah (Cigugur), Perwakilan dari Kebudayaan : Uka Candrasasmita, Perwakilan dari

Jakarta (Universitas Trisakti) antara lain Drs. Haris Sukandar dan selaku Pimpinan Tim Drs. Teguh Asmar MA. Dari 2 lokasi di sekitar alun-alun sebanyak puluhan Kapak Genggam berwarna Hijau (Virus), Gelang dan Kelenting (seperti kendi kecil) kemudian 1 Kapak Genggam dari Saurip kidul berwarna Ati Ayam.

Tahun 1979 Bpk. Amangkurat Menjadi Kuwu/Kepala Desa sampai tahun 1986, tahun 1986 sampai 1995 oleh Bapak Enda Rukendana, tahun 1995 sampai 2003 oleh Bpk. Amangkurat, tahun 2003 sampai sekarang oleh Bpk H. Awam. Pada kepemimpinan ini, berbagai situs peninggalan sejarah dilestarikan untuk mengenang dan menjadi pelajaran bagi generasi berikutnya.

Dengan demikian dari aspek sejarah dan jejak arkeologis, Desa Cibuntu memiliki potensi wisata pendidikan sejarah (edu wisata) untuk masyarakat tatar sunda. Aspek ini dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi para pecinta sejarah. Sehingga bagi para pengunjung Desa Cibuntu dapat menikmati *track* wisata sesuai alur sejarah pada situs-situs sejarah di Desa Cibuntu.

Sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan di atas, bahwa lokasi desa Cibuntu itu berbatasan dengan taman nasional gunung ciremai dan sebagian wilayahnya merupakan hutan dan pegunungan. Letak desa Cibuntu yang berada di lereng gunung Ciremai menjadikan wilayah ini merupakan salah satu jalur pendakian menuju puncak gunung Ciremai. Selain itu sebagian wilayah Desa Cibuntu juga termasuk dalam cagar alam Taman Nasional Gunung Ciremai. Keberagaman jenis flora dan fauna juga layak untuk dikembangkan dan di promosikan sebagai salah satu potensi wisata gunung di Kabupaten Kuningan, tentunya dengan tetap memperhatikan aspek konservasi alam dan lingkungan.

Pertama, Wisata Situs Purbakala. Potensi situs purbakala yang ada di Desa Cibuntu berupa situs jaman batu yang erat kaitannya dengan kepercayaan jaman dulu. Terdapat lima belas situs yang tersebar di wilayah Desa Cibuntu, yaitu : Situs Ceker Kidang, Situs Buyut Kencring, Situs Sidarngan, Situs Ruyuk Cucuk, Situs Sorog Jaya, Situs Birit Dayeuh, Situs Bujal Dayeuh, Situs Gua Sedong, Situs Hulu Dayeuh, Situs Sahurip Kaler, Situs Aki Mangkuning, Situs Sikeris, Situs Sahurip 2, Situs Buyut Panyusunan dan Situs Buyut Sigedong.

Kedua, Agrowisata. Potensi agro wisata yang dapat dikembangkan di Desa Cibuntu adalah adanya Kampung Kambing di desa tersebut. Kampung Kambing adalah kawasan budidaya kambing yang terpisah dari kawasan pemukiman, jumlah kambing yang dternakkan lebih dari 1052 ekor dengan pemilik terdiri dari 95 orang. Data ini menunjukkan jumlah kambing di Cibuntu melebihi jumlah manusianya. Kawasan ini menjadi salah satu andalan wisata yang paling diminati karena

keunikannya, yaitu kambing dikandangan dengan kandang yang menyerupai kawasan pemukiman.

Ketiga, Pemandangan suasana pesawahan dan perkebunan . Daya tarik Desa Cibuntu lainnya yang banyak diminati oleh pengunjung adalah daya tarik dari pesawahan ini adalah pertama sumber air yang selalu tersedia, bahkan berlebihan pada musim penghujan. Selain itu lahan sawah berdampingan dengan tanaman ubi jalar (penduduk memberi nama ubi jalar Manohara karena bentuk ubi yang bulat dan montok). Pengolahan pasca panen ubi Manohara ini sedikit demi sedikit akan dikembangkan baik rasa, bentuk dan kemasan agar dapat bernilai ekonomis, dan direncanakan sebagai oleh-oleh bagi para wisatawan yang mengunjungi Desa Cibuntu.

Keempat, Wisata Air Terjun Curug Gongseng. Air terjun dan tebing batu yang ada di wilayah Desa Cibuntu menjadikan wilayah ini menjadi desa wisata yang cukup diperhitungkan di Kabupaten Kuningan. Air terjun ini tidak pernah kering walaupun pada musim kemarau panjang, sehingga para wisatawan yang mengunjungi air terjun ini sangat menikmati keadaan alamiah dari air terjun Curug Gongseng ini.

Namun yang menjadi kendala sekaligus tantangan bagi pemerintahan desa adalah masalah infrastruktur sarana dan prasarana yaitu keterbatasan jalan desa yang belum dapat diakses dengan menggunakan kendaraan besar seperti bus. Setelah dilakukan pendampingan, ada beberapa perkembangan signifikan hasil dari proses penyadaran masyarakat akan pentingnya status desa wisata bagi kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah, masyarakat dan pihak lainnya seperti *Corporate Social Responsibility* (SCR) dari Bank rakyat Indonesia bersinergi membangun infrastruktur jalan desa tersebut. Walaupun belum maksimal, namun terlihat ada peningkatan partisipasi dan munculnya program-program pembenahan infrastruktur pada dokumen RPJM Desa Cibuntu.

Jumlah penduduk desa cibuntu pada tahun 2018 tercatat 1.002 jiwa terdiri dari 496 orang jenis kelamin laki-laki dan 506 perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga 258 KK. Dengan demikian, potensi Sumber Daya Manusia Desa Cibuntu secara kuantitatif masih minim. Hal ini menjadi kendala tersendiri untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia Desa Cibuntu.

Sistem kekerabatan di Desa Cibuntu relatif sangat kuat. Jumlah penduduk yang minimalis untuk ukuran normal penduduk 1 desa bagi Desa Cibuntu ditopang oleh kekuatan sistem kekerabatan. Masyarakat Desa Cibuntu terbiasa menikah dengan warga sesama warga Desa Cibuntu. Hal ini yang menjadi penyebab sistem kekerabatan yang kuat diantara sesama warga masyarakat Cibuntu. Para pelaku penggerak pariwisata dan pemerintahan desa sama-sama saudara. Ketua

Kompepar, kepala desa, sekretaris desa, ketua, BPD, Ketua PKK merupakan kerabat.

Fenomena ini nampak memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pola hubungan ini, lebih leluasa dan tidak canggung dalam berkordinasi dan melahirkan kekompakan dengan pola instruksi satu komando dari yang paling dituakan/sesepuh. Namun kelemahannya yaitu disaat ada konflik antar keluarga lebih sulit dibedakan dengan masalah pemerintahan desa sehingga masyarakat terdampak dengan masalah keluarga tersebut.

Namun walaupun demikian, masyarakat desa Cibuntu relatif terbuka (inklusif) dan toleran. Inklusif menerima kehadiran para pendatang yang terbawa oleh ikatan pernikahan. Misalnya, Pak Narjo, berasal dari Surabaya karena pernikahan diperantauan di Jakarta bertemu jodoh dengan perempuan asal Cibuntu yang sekarang menjadi isterinya. Pak Narjo diangkat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Desa Cibuntu.

Secara umum, pemahaman keagamaan masyarakat Desa Cibuntu dinilai sedang. Indikatornya, di Desa Cibuntu tidak ada kyai, tidak ada pesantren dan sedikit warga lulusan pesantren atau lulusan Lembaga pendidikan agama. Namun dalam hal pengamalan keagamaan, masyarakat Desa Cibuntu dinilai oleh berbagai pihak sangat religius. Makna religius yang dimaksud adalah mampu mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari seperti menjaga kebersihan lingkungan, gotong royong, menjaga persaudaraan dan sebagainya.

Begitupun dalam pandangan masyarakat Desa Cibuntu kepada para wisatawan yang menyalahgunakan istilah wisata pada Desa Wisata Cibuntu, kadang membuat warga desa resah dan terusik kenyamanannya. Pada satu sisi masyarakat harus menghormati para pengunjung layannya tamu yang dihormati dan dimuliakan, namun disisi yang lain sebagian wisatawan tidak mengindahkan adat istiadat dan atmosfer keagamaan masyarakat Desa Cibuntu.

Melalui program Desa Wisata Halal, masyarakat Desa Cibuntu berharap ada perubahan tatanan masyarakat yang lebih baik lagi untuk membangun kesamaan persepsi antara pribumi dan para wisatawan yang berkunjung dan menikmati keindahan Desa Wisata Cibuntu.

Dalam rangka mendorong konsep wisata halal., melalui penyepakatan bersama, maka disepakati tiga agenda prioritas; pertama, penyusunan draft Rancangan Peraturan Desa tentang pengembangan desa wisata halal untuk Desa Cibuntu termasuk di dalamnya tentang tata kelola keuangan desa. Program ini di inisiasi oleh Ketua dan Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa Cibuntu. Kedua, pendampingan sertifikasi halal salahsatu produk kuliner olahan Kelompok Wanita Tani yaitu minuman yang terbuat dari jahe dan sereh atau disebut oleh

masyarakat setempat dengan istilah Jasreh Instant. Ketiga, Sosialisasi konsep Desa Wisata halal kepada seluruh warga desa dan wisatawan agar semua memiliki komitmen untuk menjaga tatanan kehidupan masyarakat yang halal dan baik secara offline dan online pada website <http://www.visitcibuntu.com> dengan logo Majelis Ulama Indonesia.



Gambar 1
Logo Desa Wisata Cibuntu

Logo ini menunjukkan bahwa sudah ada kemauan bagi Desa Wisata Cibuntu untuk beranjak pada konsep wisata halal dari aspek layanan, produk dan regulasi. Pada gilirannya proses ini akan berjalan secara *sustainable* ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama program masyarakat bina antara pemerintahan Desa Cibuntu dan Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Akhirnya tim PkM UIN Sunan Gunung Djati Bandung menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidik Tinggi Islam yang telah mensponsori program Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Riset di Desa Cibuntu Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan. Begitupula diucapkan terima kasih kepada pemerintahan dan masyarakat Desa Cibuntu yang sudah bekerjasama dalam terlaksananya program PkM ini.

PENUTUP

Kesimpulan

Kegiatan pendampingan desa wisata halal cibuntu telah dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan. Seluruh program dan kegiatan yang searah dengan visi, misi desa Cibuntu diharapkan dapat senantiasa berjalan baik dengan motor penggerak Kelompok Penggerak Pariwisata (Kompepar) Desa Wisata Cibuntu. Hal ini dilakukan secara demokratis, partisipatif dan berkelanjutan dan telah menghasilkan:

Pertama, terbangun kesadaran politik pemerintah desa, stakeholder Kompepar dan masyarakat Desa Cibuntu dalam membangun dan mengembangkan potensi

wisata sejarah, wisata alam, dan agrowisata menjadi destinasi wisata halal. Kesadaran tersebut telah dimulai dengan penyusunan draft rancangan Peraturan Desa tentang pengembangan desa wisata halal untuk Desa Cibuntu.

Kedua, terbina keberdayaan masyarakat dalam mengelola Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia Desa Cibuntu agar siap mewujudkan desa wisata halal;

Ketiga, munculnya perhatian pemerintah daerah pada pengembangan masyarakat Desa Cibuntu dengan membangun Pendopo Pemberdayaan Desa Cibuntu sebagai tempat diskusi dan konsultasi antara pihak- pihak terkait masyarakat Desa Cibuntu.

Saran

Pendampingan di desa Wisata Cibuntu untuk menjadi Desa Wisata Halal belum optimal, oleh karena itu disarankan kepada:

Pemerintah daerah Kabupaten Kuningan diharapkan dapat memfasilitasi Desa Cibuntu sebagai pilot project model penerapan konsep wisata halal yang dapat menjadi rujukan kawasan wisata lainnya;

Pemerintahan desa dan kecamatan diharapkan dapat bekerjasama secara sinergis dengan Kelompok Penggerak Pariwisata (Kompepar) untuk mewujudkan Cibuntu sebagai Desa Wisata Halal melalui alur Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hurairah, 2006, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*, Bandung: Humaniora
- Bachtiar, Wardi, "Sosiologi Klasik; Dari Comte hingga Parsons" (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006).
- Bogdan, Robert dan J. Taylor, Steven, "Introduction to Qualitative Research Method", terj. Arief Furchan, "Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif," (Surabaya: Usaha Nasional, 1992).
- Diamond, Larry (2003) dalam Deny Suito, *Membangun Masyarakat Madani*,
- Edi Suharto, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung:Refika Aditama
- Edi Suharto, 2008, *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan kebijakan*, Bandung:Refka Aditama
- Fukuyama, Francis, "Sosial Capital and Civil Society," (Japan: The Intitute of Public Policy, 1999)
- Gellner, Ernest, "Membangun Masyarakat Sipil; Prasyarat Menuju Kebebasan," terjemahan oleh Ashab Mahasin dkk., (Bandung: Mizan, 1995)
- George, Vic, & Wilding, Paul, " Ideologi dan Kesejahteraan Rakyat," (Jakarta: Grafiti, 1992)
- Goffman, Erving, 1959. *The Presentation of Self In Everyday Life* , Penguin Book, Cox & Wyman Ltd, Great Britain
- Hadari Nawawi, 1998, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta:Gajah Mada University Press.
- Hafsah, Mohammad Jafar, "Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat," (Bandung: Iris Press, 2008).
- Hamim, Ahmad Husni, *Good Governance*, Balai Diklat Keagamaan Bandung, Bandung, 2009
- Harry Hikmat, 2006, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung:Humaniora Utama Press.
- Hasyim bin Muhammad bin Husain Naqur, al-Ahkam al-Siyahah wa Atsaruha: Dirasah Syar'iyah Muqaranah (Riyadh: Dar Ibn al-Jawzi, 1424).
- Hikmat, Harry, "Strategi Pemberdayaan Masyarakat," (Bandung: Humaniora Utama Press, 2006), cet. IV.
- Kusnaka Adminiharja dan Harry Hikmat, *Participatory Reearch Appraisal dalam Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Bandung: Humaniora.
- M. Fadhil Nurdin, 1990, *Pengantar Study Kesejahteraan Sosial*, Bandung:Angkasa.
- Mohammad Jafar Hafsah, 2008, *Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Iris Press
- Munirah, L., & Ismail, H. N. Muslim," Tourists Typologi in Malaysia: Perspectives and Challenges". *Proceedings of the Tourism and Hospitality International Conference* (Malaysia: Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Built Environment. 2012).
- Safei, Agus, Ahmad dan Machendrawati, Nanich, 2003, *Pengemangan masyarakat Islam Dari Ideologi, Strategi Sampai Tradisi*, Bandung:Remaja Rosda Karya
- Shamdan, Agus, " Indikator Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Ditinjau dari Aspek Ketahanan Sosial Masyarakat," (Jakarta: Departemen Sosial RI, 2004)
- Soetomo, 2006, *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, Edi, " *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*," (Bandung: Refika Aditama, 2005)
- Sunyoto Usman, 2005, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Wadjdy, Farid, dan Mursyid, "Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)," (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)
- Yossihara, Anita, et.al, 2007. *Refleksi Kemiskinan, Modul Khusus Fasilitator*, Dirjen Cipta karya